

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 ini untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2019 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 adalah “*Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera*”. Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan upaya-upaya dengan menetapkan misi sebagai berikut : 1) *Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi*; 2) *Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan*; 3) *Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera*; 4) *Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing*; 5) *Boyolali lumbung padi dan pangan nasional*; 6) *Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan*; dan 7) *Boyolali lebih maju dan berteknologi*.

Dari ke tujuh visi di atas terdapat inovasi kinerja atau prestasi yaitu:

1. Misi pertama, Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi, adalah kelanjutan dari tahap lima tahun sebelumnya. Setelah Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Perizinan dari 30 menjadi 3 Perda, dan Penetapan Tarif Rp.0 atau “GRATIS” kecuali IMB. Capaian terpenting dari Misi pertama ini adalah adanya investasi rata -rata 1,5 Trilyun pertahun dan khusus tahun 2018 1,6 Trilyun, disamping itu sampai saat ini Boyolali kekurangan tenaga kerja untuk memenuhi pertumbuhan industri yang ada. PTSP beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya Unit kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2019, dan Role Model Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik Tahun 2019, serta Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;
2. Misi kedua Boyolali membangun untuk perubahan, diantaranya adalah infrastruktur dasar dengan pencapaian 74% kondisi baik untuk ruas jalan kabupaten sepanjang 678,35 Km, dari 44 pasar, tinggal 11 pasar yang belum direvitalisasi (6 pasar kondisi sedang dan 5 pasar kondisi tidak baik). Pembangunan embung pertanian 43 (empat puluh tiga) tersebar di 19 kecamatan, tahun 2019 ada penambahan pembangunan embung sebanyak 8 (Delapan) buah embung dengan total kapasitas yang dibangun sebesar 83.134m³ dan total luas areal genangan 2,670 ha. Dengan jargon “kota kecil yang seksi”, Boyolali berhasil menata perkantoran pemerintah dalam satu kawasan dilengkapi dengan pembangunan landmark Gedung Lembu Sora, Museum R. Hamong Wardoyo, Kebun Raya Indrokilo, DOM Mahesa lima tempat ibadah dalam satu kompleks, serta replika 7 (tujuh) keajaiban dunia (di simpang Srikantha dipasang Menara Pisa, Menara Eiffel, dan Patung Liberty. Sedangkan di Alun-Alun Lor dipasang replika Candi Borobudur, Masjid Taj Mahal, Sphinx, dan, Piramida), setelah itu

pada pada tahun 2019 Kabupaten Boyolali membangun Stadion Kebo Giro di Kecamatan Cepogo, Relokasi Rumah Sakit Simo, Simpang Lima Selo, Relokasi Pasar Pengging dan beberapa pasar lainnya, serta Relokasi terminal. Boyolali juga memiliki Perpustakaan dengan SLIM (*System Library Informasi Management*). Perpustakaan remen maos memiliki fasilitas berupa Buku Tamu *Online*, *BI Corner*, Wifi Area, Online Katalog (OPAC), Ruang Diskusi/Pertemuan, dan Ruang Bermain Anak. Sarana olah raga 20 (dua puluh) sarana olah raga sejak 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai 53 M;

3. Misi ketiga, Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera, ditandai dengan capaian LHKPN, LHKASN, dan SiharkaBoy, Keterbukaan harta kekayaan pejabat publik, Capaian Patuh tepat waktu 100% untuk Eksekutif, dan Legislatif, dan satu satunya Pemerintah Kabupaten yang wajib dan patuh dalam melaporkan LHKASN untuk wajib lapor Non LHKPN 5 tahun berturut turut. Menghentikan Gratifikasi, terkait penerimaan fee bank bagi bendahara SKPD dari bank pemberi pinjaman pegawai, menghapuskan seluruh honorarium yang merupakan patologi birokrasi bagian dari korupsi sistemik, melakukan efisiensi Belanja Pegawai, melaksanakan Non Cash Transactions (NCT) sejak 2015 dan telah memperoleh opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut serta adipura 13 (dua belas) kali berturut-turut. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019. Efisiensi cross cutting program yang tidak sesuai dengan RPJMD melalui refocusing sebesar 64,35%, atau dari 2.028 kegiatan menjadi 723 kegiatan di semua OPD. Melakukan perbaikan terhadap Rumah tidak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 2.971 rumah dengan nilai 16,8M. Efisiensi anggaran senilai Rp 32,463 Miliar. Postur keuangan daerah yang sehat perbandingan antara Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai ASN yaitu Tahun 2019 57:43. Trend Belanja Modal yang semakin meningkat dari tahun 2016 dari 396 di tahun 2016, 443M ditahun 2017, 521 M di tahun 2018, dan 555 M di tahun 2019. Pemberian Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) selain berdasarkan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas juga berdasarkan statis (kehadiran dan kinerja) dan dinamis (peran tertentu), semua honorarium pegawai sudah dihapus, sehingga penerimaan pegawai hanya melalui gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)
4. Misi keempat, Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing, ditunjukan dengan capaian, akreditasi paripurna dan *triangle sistem* RSUPA (Integrasi Tatakelola SIM RS, Mutu dan Remunerasi), Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 199, di replikasi secara nasional oleh kementerian kesehatan. Pendidikan, Pemberian penghargaan berupa smartphone kepada siswa berprestasi sebanyak 53 siswa SMP yang memiliki prestasi akademis Ujian Nasional dengan hasil nilai 100, serta duta seni ke luar negeri (prancis dan spanyol).
5. Misi kelima, Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional, capaianya ditetapkannya Boyolali sebagai Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, surplus 7 dari 10 komoditas strategis, Neraca ketersedian dan kebutuhan pangan terutama komoditas padi (beras) di Kabupaten Boyolali tahun 2016 surplus 73.336,04 Ton Beras, tahun 2017 tercapai surplus beras sebesar 59.493,53 Ton, tahun 2018 tercapai surplus beras sebesar 63.805 ton, dan tahun 2019 surplus sebesar 63.807,16 Ton. Boyolali juga memberikan bantuan keringanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali berupa bantuan keringanan PBB 90% dan lahan irigasi teknis dengan kepemilikan $\leq 5.000 \text{ m}^2$. Pemasaran Padi Organik Tahun 2018. Penjualan beras organik ke daerah Jakarta, Tangeang, Bekasi dan Jogja sebanyak 15 ton/bulan. Beras organik yang dipasarkan pada pasar dalam negeri dengan jenis Pandan Wangi Putih sebanyak 4 Ton/bulan; Pandan Wangi Coklat sebanyak 3 Ton/bulan; Beras Merah sebanyak 6 Ton/bulan; Beras hitam sebanyak 2 Ton/bulan. Beras organik yang dijual

di dalam negeri umumnya dijual di pasar modern, dengan kemasan 1 kg/pack, dengan harga Rp 20.000-/kg;

6. Misi keenam, Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan capaiannya adalah kota penghasil susu, produksi daging dan populasi sapi perah Boyolali terbesar di Jawa Tengah;
7. Misi ketujuh Boyolali, lebih maju dan berteknologi, sampai tahap infrastruktur mulai data center, jaringan, pengembangan sistem dan berbagai aplikasi yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Wifi gratis pada titik-titik di pusat kota dan kecamatan. Boyolali juga telah menerapkan pilkades elektronik.

RPJMD Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 memuat tujuan dan sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Boyolali), indikator kinerja dan rencana capaian target kinerja tahunan mulai tahun 2016-2021 serta arah kebijakan yang menjadi program utama. Program utama ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunan. Guna menjaga konsistensi penggunaan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun perencanaan, dibakukanlah sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan kinerja tahunan.

Berpedoman pada RPJMD dan IKU, Pemerintah Kabupaten Boyolali merencanakan kinerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki 19 sasaran strategis dengan 183 indikator kinerja. Prosentase Indikator Kinerja Utama menjadi indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% karena semua indikator kinerja dalam dokumen RPJMD dijadikan indikator dalam dokumen IKU.

Hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran tahun 2019 serta penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, dari 19 (sembilan belas) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, diperoleh:

1. Tiga belas (16) sasaran (84,21%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Tiga (2) sasaran (10,53%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Tiga (1) sasaran (5,26%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);

Prosentase capaian sasaran secara keseluruhan 134,03% (kategori sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum target kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 telah terpenuhi.

Tingkat capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2018, dari 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah :

1. Seratus tujuh (107) indikator kinerja (58,47%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Enam puluh empat (64) indikator kinerja (34,97%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Enam (6) indikator kinerja (3,28%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);
4. Lima (5) indikator kinerja (2,73%) dengan capaian kurang dari 55% (kategori Kurang);
5. Satu (1) Indikator Kinerja (0,55%) yang tidak memasang target di tahun 2019 ini.

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 secara keseluruhan 138,96% (kategori sangat baik).

Capaian kinerja per SKPD dari 31 OPD (tidak termasuk kecamatan) dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya sebagai berikut :

1. Tujuh belas (20) OPD (64,52%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Tiga belas (10) OPD (32,26%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Satu (1) OPD (3,22%) dengan capaian 55% sampai 75% (kategori cukup);

Prosentase capaian sasaran oleh OPD secara keseluruhan 125,28% (kategori sangat baik).

Anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2019 untuk belanja sebesar 2.468.421.561.000,00, dana yang terealisasi digunakan sebesar Rp. 2.381.601.864.739,00 atau 96,48% (**Realisasi sebelum pemeriksaan BPK menuju audited**).